

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (PHPU). Sebagai lembaga yang tidak hanya memutus sengketa secara kuantitatif, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi yang substantif dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, MK berupaya mencapai keadilan substantif, yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, serta tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur hukum. Keadilan substantif ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dalam pemilu mendapatkan perlakuan yang adil, terutama dalam menghadapi potensi kecurangan yang dapat terjadi baik oleh individu maupun lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, MK memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani kecurangan tersebut agar proses pemilu tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam konteks PHPU dan pentingnya penerapan keadilan substantif dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan fleksibilitas MK dalam mengadili sengketa proses Pemilu merupakan wewenang MK guna mencapai tujuan hukum, dan menjaga integritas Pemilu yang adil. Yang mengedepankan keadilan substantif.

Kata Kunci: Wewenang, Mahkamah Konstitusi, Pemilu

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) has a very important role in maintaining democracy in Indonesia, especially in resolving disputes over general election results (PHPU). As an institution that does not only decide disputes quantitatively, the Constitutional Court also functions as a guardian of substantive democracy by considering the qualitative aspects of organizing elections. In carrying out its duties, the Constitutional Court seeks to achieve substantive justice, which prioritizes moral and ethical values, and does not only focus on compliance with legal procedures. This substantive justice is important to ensure that all parties in an election receive fair treatment, especially in the face of potential fraud that can occur both by individuals and election management institutions. Therefore, the Constitutional Court has the responsibility to identify and deal with such fraud so that the electoral process continues to run well and in accordance with democratic principles. This research aims to analyze the role of the Constitutional Court in the context of PHPU and the importance of applying substantive justice in every legal decision taken.

The research method used is normative research. The approaches used are statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The results showed that the flexibility of the Constitutional Court in adjudicating disputes over the election process is the authority of the Constitutional Court to achieve legal objectives, and maintain the integrity of a fair election. Which prioritizes substantive justice.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Elections